



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kajian Yuridis Hak Waris Anak Dari Perkawinan Pertama Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2792K/Pdt/2008)

PRAWITA DWI CHAIRINI, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**KAJIAN YURIDIS HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN
PERTAMA TERHADAP HARTA PENINGGALAN AYAHNYA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 2792K/PDT/2008)**

Prawita Dwi Chairini¹, Abdul Ghofur Anshori²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian hak waris anak terhadap harta peninggalan ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2792K/PDT/2008 ditinjau dari hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata dan untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan pemindahtanganan beberapa bidang tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2792K/PDT/2008.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder (bahan kepublikan) berupa putusan Mahkamah Agung dan buku-buku literatur. Data yang diperoleh dari penelitian ini nantinya dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa : 1) Anak dari istri pertama merupakan ahli waris dan memiliki hak atas pembagian harta warisan/harta asal bapak kandungnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Berkaitan dengan pembagiannya sama besar yaitu kepala demi kepala atau 1 berbanding 1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga hak antara anak dari istri pertama dan istri kedua adalah sama. 2) Akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT/Camat Kecamatan Karanganyar batal demi hukum karena cacat hukum, yakni tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian mengenai kebebasan kehendak para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Karena pada saat akta jual beli tersebut dibuat, para pembeli masih di bawah umur.

Kata kunci : hak waris anak, hukum waris adat, hukum waris islam, hukum waris perdata

¹ Surakarta, Jawa Tengah.

² Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Kajian Yuridis Hak Waris Anak Dari Perkawinan Pertama Terhadap Harta Peninggalan Ayahnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2792K/Pdt/2008)

PRAWITA DWI CHAIRINI, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**THE STUDY OF JURIDICAL INHERITANCE CHILDREN FROM FIRST
MARRIAGE AGAINST HER FATHER LEGACY
(A CASE STUDY OF THE SUPREME COURT VERDICT NUMBER:
2792K / PDT / 2008)**

Prawita Dwi Chairini¹, Abdul Ghofur Anshori²

ABSTRACT

This research aims to know the basic law into consideration judges in deciding the division of inheritance of the child against his father's legacy of wealth based on the ruling of the Supreme Court Decision Number: 2792K / PDT / 2008 in terms of customary law of inheritance, the Islamic inheritance laws and civil law of inheritance and to know the basic law into consideration judges in deciding the cancellation of the purchase agreement some of the land based on the ruling of the Supreme Court Decision Number: 2792K / PDT / 2008.

The type of research used in the writing of this thesis is to study the juridical normative descriptive using secondary data (the literature) by Supreme Court Decision and the textbook. Data obtained from this research will be analyzed by means of qualitative descriptive.

The result of this study is : 1) The children of the first marriage is the beneficiary and have the right to inheritance/property division of origin of their father, in accordance with the provisions of customary law, civil law and Islamic law. With the equal to the division of the same amount is head to head or for the sake of comparison 1 equal 1 between the son and the daughter. So that the rights of children of the first wife and the second is the same. 2) The purchase agreement that made up before the conveyancer/Camat subdistrict karanganyar annulled by law because of faulty legal, i.e the validity of the agreement is not fulfilled requirements regarding freedom of the will of the parties and proficiency to make an agreement. Because when the deed is made, the buyers is still under age.

Keywords: inheritance rights of children, customary inheritance law, Islamic inheritance law, inheritance of civil law

¹ Surakarta, Central Java.

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.